

**PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT KONSERVASI
DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Bisnis**

Disusun Oleh:

**NAMA : GATOT ARI FIYANTO
NPM : 1732000204
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : GATOT ARI FIYANTO
NPM : 1732000204
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT KONSERVASI DAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 28 Desember 2021

Pembimbing



(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan Politeknik STIALAN Jakarta di Jakarta pada tanggal **28** Desember 2021

Ketua merangkap anggota,



(Dr. Luki Karunia, MA)

Sekretaris merangkap anggota,

(Nurmita Sari, SE, MM)

Anggota,

(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ari Fiyanto
NPM : 1732000204
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul ***"Pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan"*** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 28 Desember 2021

Penulis,



Gatot Ari Fiyanto

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Selama penulisan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis alami, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Arifiani Widjayanti, SP, M.Si, PH.D, selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Ibu Tintin Sri Murtinah, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Ir. Andi Rusandi, M.Si, selaku Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
5. Ibu Yusra, S.Si, M.Si, selaku Kepala Subkoordinator Tata Usaha, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
6. Seluruh Dosen dan Staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama studi;
7. Seluruh pegawai Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
8. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberi doa dan motifasinya kepada penulis.
9. Istri dan anak-anak (Gista Rahma Arifiyanto dan Gina Nisa Arifiyanto) yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis.
10. Rekan-rekan Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya Program Studi ABSP Angkatan 2017, yang ikut membantu sehingga Skripsi ini dapat selesai;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik, tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

GA



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Gatot Ari Fiyanto, 1732000204

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skripsi, 99 halaman

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaan dokumen dan wawancara penelitian dengan teknik wawancara semi terstruktur kepada *key informant*. Prosedur pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyajian data.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa secara umum pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien. Perencanaannya disusun sesuai kebutuhan namun belum dilengkapi dengan adanya data dukung penghapusan. Inventarisasi belum dilaksanakan secara maksimal. Penghapusan dan pemindahtanganan belum tuntas dilaksanakan dan perlunya peningkatan pada pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut perlu melengkapi perencanaan kebutuhan dan penganggaran dengan data dukung penghapusan Barang Milik Negara. Melaksanakan inventarisasi secara keseluruhan dengan cara memberikan stiker label Barang Milik Negara pada seluruh aset dan segera mengajukan penghapusan kembali. Selanjutnya, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut berkoordinasi kepada Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dapat menurunkan nilai limit penjualan atau lelang Barang Milik Negara serta memaksimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian.

Kata kunci: pengelolaan barang milik negara, penghapusan

ABSTRACT

Gatot Ari Fiyanto, 1732000204

**MANAGEMENT OF STATE-OWNED ASSET AT THE
DIRECTORATE CONSERVATION AND MARINE BIODIVERSITY
OF THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**

Thesis, 99 pages

The purpose of this study is to determine the management of State-Owned Asset at the Directorate Conservation and Marine Biodiversity of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries starting from planning needs and budgeting, security and maintenance, disposal and transfer as well as supervision and control of State-Owned Asset.

The research was conducted using descriptive qualitative research methods. The data collection technique is done by reviewing documents and research interviews with semi-structured interview techniques to key informants. The data processing and analysis procedure in this study started from data collection, data examination, data classification, and data presentation.

Based on the results of this study, it is known that in general the management of State-Owned Asset at the Directorate Conservation and Marine Biodiversity of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries is still not implemented optimal, effectively and efficiently. The plan is prepared as needed but has not been equipped with data to support deletion. Inventory has not been carried out optimally. The disposal and transfer have not been completed yet and there is a need for improvement in the supervision and control of State-Owned Asset.

The Directorate Conservation and Marine Biodiversity needs to complete needs planning and budgeting with data to support the disposal of State-Owned Asset. Carry out an overall inventory by providing label sticker of State-Owned Asset to all asset and immediately submitting a disposal. Furthermore, the Directorate of Conservation and Marine Biodiversity coordinates with the Finance Bureau of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the State-Owned Asset and Auction Service Office to be able to lower the limit on the sale or auction of State Property and maximize monitoring and control activities.

Keywords: management state-owned asset, disposal

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Manajemen	9
a. Pengertian Manajemen	9
b. Fungsi-Fungsi Manajemen	11
c. Tujuan Manajemen	13
2. Manajemen Aset	14

3. Aset.....	16
4. Barang Milik Negara.....	20
5. Pengelolaan Barang Milik Negara	22
a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	24
b. Pengadaan	26
c. Penggunaan	26
d. Pemanfaatan	27
e. Pengamanan dan Pemeliharaan.....	28
f. Penilaian.....	30
g. Penghapusan.....	31
h. Pemindahtanganan.....	32
i. Penatausahaan.....	35
j. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.....	36
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Konsep Kunci.....	42
D. Model Berpikir	44
E. Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Metode Penelitian.....	46
B. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Sumber Data.....	48
2. Penelaahan Dokumen.....	49
3. Wawancara.....	50
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Pembahasan	56
1. Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.....	58
a. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN.....	59
b. Penyusunan Anggaran BMN.....	63
2. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan	66
a. Pengamanan BMN.....	67

b. Pemeliharaan BMN	72
3. Aspek Penghapusan dan Pemindahtanganan.....	76
a. Penghapusan BMN	77
b. Pemindahtanganan BMN	82
4. Aspek Pengawasan dan Pengendalian	91
a. Pemantauan Periodik.....	91
b. Pemantauan Insidental	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
1. Laporan Neraca BMN Tahun Anggaran 2018 s.d 2020.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	40
3. Daftar <i>Key informant</i>	51
4. Laporan RKBMN Direktorat KKHL.....	59
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Direktorat KKHL.....	68
6. Laporan Barang Kuasa Pengguna dan RKA-KL Direktorat KKHL.....	73
7. Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi Direktorat KKHL.....	78
8. Daftar Pemindahtanganan BMN Direktorat KKHL	83
9. Laporan Wasdal BMN Direktorat KKHL.....	92

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1. Fungsi Manajemen	13
2. Manajemen Aset.....	16
3. Alur Permohonan Penjualan BMN.....	34
4. Ruang Lingkup Pengelolaan BMN.....	39
5. Model Berpikir.....	44
6. Gudang penyimpanan aset Direktorat KKH.....	71

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Peradaban suatu negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara. Peradaban dari suatu bangsa untuk menghagai apa yang telah dibangun sendiri. Dari Barang Milik Negara akan diketahui sikap, nilai dan karakter suatu bangsa. Barang Milik Negara juga mampu mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik dan bagaimana suatu organisasi khususnya instansi pemerintah mengelola pembangunan dengan kualitas yang baik. Barang Milik Negara yang sejatinya merupakan unsur penting dan strategis bagi Kementerian dan Lembaga negara merupakan aset negara yang seringkali tidak dianggap penting eksistensinya. Aset negara perlu dikelola dengan menerapkan proses manajemen yang baik dengan menerapkan beberapa aspek mulai dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan guna memberikan manfaat yang maksimal.

Barang Milik Negara atau yang disingkat dengan BMN merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa perbendaharaan merupakan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BMN merupakan sumber daya penting bagi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pengelolaan BMN harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat berdaya dan berhasil guna secara optimal, efisien, dan efektif.

Pengelolaan BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman dilaksanakan berdasarkan pertimbangan bahwa pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Efektif berarti menyediakan pelayanan dari aset digunakan secara efektif yaitu digunakan sesuai dengan tujuannya, tepat sasaran sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung

pelayanan publik. Efisien tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana dengan menghemat sumber daya yang ada guna bisa memaksimalkan aset yang ada untuk mencapai tujuan. Menghemat sehemat mungkin dan sebaik mungkin, tidak menyia-nyiakan aset yang ada di sebuah entitas atau organisasi pemerintahan.

Pengertian BMN menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 1 Ayat 1 adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan BMN merupakan suatu tindakan/perbuatan hukum dalam mengelola BMN yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan Pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Penghapusan;
8. Pemindahtanganan;

9. Penatausahaan; dan

10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

BMN diawal mula diadakan adalah untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau menunjang tugas dan fungsi dari Pengguna Barang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola BMN dan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pemimpin kementerian adalah Pengguna Barang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam lima Tahun Anggaran terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh opini yang belum memuaskan. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015, kemudian dalam dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017 memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau *Disclaimer*. Kementerian Kelautan dan Perikanan baru memperoleh opini WTP kembali pada tahun 2018 dan 2019. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa ada permasalahan pada pengelolaan BMN yang belum sepenuhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas.

Berdasarkan penelaahan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi BMN Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Direktorat KKHL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun

Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat data perkembangan Laporan Neraca BMN yang terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Laporan Neraca BMN
Tahun Anggaran 2018 s.d 2020

No	Uraian Neraca	Neraca Tahun 2018	Neraca Tahun 2019	Neraca Tahun 2020
1	Tanah	643.500	643.500	643.500
2	Peralatan dan Mesin	9.522.135.985	10.293.386.645	9.943.486.645
3	Aset Tetap Lainnya	270.711.631	270.711.631	270.711.631
4	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1.975.934.173	1.941.117.000	1.935.597.000
TOTAL		11.769.425.289	12.505.858.776	12.150.438.776

Sumber: Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi BMN Direktorat KKHL Tahun Anggaran 2018 - 2020

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa Aset Tetap yang Tidak Digunakan pada Direktorat KKHL yang merupakan aset dengan kondisi Rusak Berat menunjukkan nilai yang besar dan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 nilainya tidak banyak berkurang. Aset dengan kondisi Rusak Berat seharusnya segera dilakukan penghapusan karena membebani dalam hal penyimpanan dan pengamanan aset.

Penghapusan adalah siklus penting dari proses pengelolaan BMN. Permasalahan penghapusan muncul jika Pengguna Barang tidak segera melakukan proses penghapusan. Dampaknya menyebabkan aset dengan kondisi rusak berat menumpuk dalam gudang penyimpanan aset. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Penghapusan adalah:

tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

BMN Direktorat KKHL dengan kondisi Rusak Berat menurut sifat dan jenisnya tidak berbeda dengan BMN pada instansi lainnya, yaitu berupa peralatan dan mesin seperti meja kursi kerja, lemari penyimpanan, komputer, laptop, printer. Aset-aset tersebut sudah lama disimpan di gudang penyimpanan aset seharusnya sudah dihapuskan agar tidak menjadi permasalahan pengelolaan BMN.

Dalam pengelolaan BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f, Pasal 42, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan dan pemeliharaan dilakukan secara rutin dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan karakteristik masing-masing BMN sesuai kebutuhan, kondisi dan ketersediaan biaya.

Ketersediaan biaya setiap tahun anggaran dilaksanakan sejak perencanaan kebutuhan. Semakin banyak yang harus dilakukan pengamanan dan pemeliharaan, maka semakin besar biaya yang harus dibutuhkan. Besarnya biaya pengamanan dan pemeliharaan BMN tanpa diikuti dengan adanya pengurangan BMN menandakan bahwa perencanaan dan pengawasan BMN tidak optimal. Hal ini menyebabkan tidak terwujudnya pengelolaan BMN yang efektif dan efisien.

Pengelolaan BMN yang baik yaitu dengan terciptanya perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*) secara tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Tahapan manajemen aset sangat baik dijalankan guna memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan**”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan BMN pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan BMN pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif baik dunia akademis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Terhadap Dunia Akademis

Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam manajemen aset dan dapat menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan pengelolaan BMN.

b. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Diharapkan dapat menyumbangkan saran-saran guna mengoptimalkan pengelolaan BMN.